Jurnal Ilmu Sosial **Mamangan**

**Kontestasi Ruang:
Tinjauan Sosiologis Terhadap Keadilan Ekologis**
Prof. Dr. Afrizal, MA.

**Politik Ekologi :
Ramah Lingkungan Sebagai Pembenaran**
Dr. Zainal Arifin, M. Si.

**Fiqh Lingkungan;
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lingkungan**
Abrar, M. Ag.

**Bertani di Dua Kota Asia;
Menarik Pelajaran Dari Jakarta Dan Manila**
Dr. Semiarto A. Purwanto, M. Si.

**Puar Cama, Hutan Untuk Anak Cucu;
Konsep Sustainability Forest Lokal di Mbeliling, Manggarai Barat**
Firdaus, S. Sos., M. Si.

Perjuangan Hak Ekologis
Dian Kurnia Anggreta, S. Sos., M. Si.

Jurnal Ilmu Sosial **Mamangnan**

Nomor I, Volume 1
Tahun 2012

ISSN :
2301-8496

Program Studi Pendidikan Sosiologi,
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Padang

Mitra Bestari

Prof. Dr. Afrizal, MA. (FISIP, Unand Padang)
Dr. A. Latief Wiyata, M. Si. (Universitas Jember, Jember)
Prof. Dr. Badaruddin, M. Si. (FISIP, USU Medan)
Dr. Fikarwin Zuska, M. Si. (FISIP, USU Medan)
Nurus Shalihin, M. Si., Ph.D. (Fak. Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang)
Dr. Semiarto A. Purwanto, M. Si. (FISIP, UI Jakarta)
Dr. Wahyu Wibowo, M. Si. (Universitas Nasional, Jakarta)

Dewan Redaksi

Dr. Zusmelia, M. Si.
Dr. Maihasni, M. Si.
Adiyalmon, S. Ag., M. Pd.
Firdaus, S. Sos., M. Si.

Pemimpin Redaksi

Firdaus, S. Sos., M. Si.

Anggota Redaksi

Dian Kurnia Anggreta, S. Sos., M. Si.
Rinel Fitlayeni, S. Sos., MA.
Surya Prahara, SH.

ISSN: 2301-8496
viii + 65 halaman, 21 x 29 cm

Alamat Redaksi:

Laboratorium Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Padang
Jl. Gunung Pangilun, Padang
Email: redaksimamangan@yahoo.com

Penerbit :

Program Studi Pendidikan Sosiologi, STKIP PGRI Padang

Contac person :

Firdaus (Hp. 085263881221. Email : daus_gila@yahoo.com)

Pengantar Redaksi

Beberapa dekade belakangan, isu lingkungan terus berkembang dan menjadi topik utama di berbagai diskusi ilmiah dan mimbar publik. Diskursus tentang lingkungan kemudian semakin meluas pada berbagai dimensi hubungan antara manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Sebuah teori klasik yang ditulis oleh Steward mencatat bahwa pada berbagai suku bangsa berburu – meramu (*hunting – gatering*), variasi komposisi jumlah anggota suatu kelompok, sangat ditentukan oleh sumber alam yang ada di sekitarnya dan siklusnya; ada yang besar jumlah anggotanya dan ada pula yang kecil (Poerwanto, 2005:63). Atas dasar ini kemudian isu lingkungan terus berkembang luas mencakup berbagai dimensi.

Mengikuti berbagai perkembangan isu lingkungan dengan dimensi yang sangat luas itu, kami memiliki kesadaran bahwa masalah lingkungan tidak bisa dilihat dan dimaknai secara parsial dalam dimensi yang berorientasi fisik, akan tetapi jauh lebih penting melihat dan memaknainya dalam dimensi sosial yang luas. Dimensi sosial itu mencakup berbagai aspek, baik yang berhubungan langsung dengan lingkungan fisik maupun tidak. Atas dasar itulah, Jurnal MAMANGAN edisi perdana yang diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Sosiologi STKIP PGRI Sumbar yang kini ada di tangan pembaca memilih untuk fokus pada isu lingkungan dengan mencoba melihat dan memaknainya dalam dimensi sosial dari berbagai perspektif.

Secara keseluruhan, tulisan pada edisi perdana ini membahas isu lingkungan dari berbagai pendekatan dan praktek di Indonesia dan Asia. Tulisan pada edisi ini terdiri dari 6 (enam) buah tulisan yang bersumber dari penelitian lapangan dan artikel teoritik yang disumbangkan oleh para akademisi dan peneliti yang sudah berkecimpung lama dalam bidangnya.

Tulisan pertama ditulis oleh Afrizal, yang berbicara tentang kontestasi ruang oleh berbagai pihak pada masyarakat modern yang didominasi oleh keperluan untuk uang dan konservasi. Afrizal menekankan tulisannya pada aspek kontestasi ruang dan keadilan ekologis dalam masyarakat Indonesia dengan menggunakan perspektif keadilan ekologis. Argumen pokok artikelnya disandarkan pada asumsi bahwa ruang merupakan habitat suatu masyarakat hukum adat Indonesia. Dengan asumsi tersebut, Afrizal berargumen bahwa penggunaan ruang dalam habitat masyarakat hukum

adat dengan cara mengibiri eksistensi mereka adalah suatu ketidakadilan ekologis. Oleh sebab itu resistensi serta perlawanan warga masyarakat hukum adat adalah resistensi dan perlawanan terhadap ketidakadilan ekologis.

Tulisan kedua ditulis oleh Zainal Arifin tentang politik ekologis. Tulisan Arifin mendiskusikan tentang perkembangan wacana ramah lingkungan sebagai salah satu cara dalam mengatasi berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan, serta dampaknya bagi keadilan sosial di tengah masyarakat. Menurut Arifin tidak semua aktivitas, program dan kebijakan yang dibuat dan dilakukan oleh pemerintah, NGO maupun melalui perorangan mampu membawa dampak yang berarti dalam mengatasi persoalan lingkungan. Banyak kasus justru menunjukkan bahwa aktivitas, program, dan kebijakan tersebut hanyalah wacana yang dikembangkan demi kepentingan tertentu.

Tulisan ketiga ditulis oleh Abrar yang mengusung isu rekonstruksi pemahaman yang berwawasan antroposentris terhadap alam dengan pemahaman yang teosentris dengan meletakkan segala sesuatu sebagai bagian integral dari moralitas agama, sehingga alam dan ekosistemnya berproses secara seimbang dan tidak menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Perspektif ini menurutnya juga mengacu pada kepentingan manusia yang dalam Islam disebut *al-Maslahah (human welfare)*, akan tetapi kepentingan yang didasarkan pada moralitas agama bukan antroposentris.

Tulisan keempat ditulis oleh Semiarto A. Poerwanto yang mengulas tentang aktifitas pertanian di dua kota, kota Manila dan kota Jakarta. Di Jakarta, pertanian kota lebih merupakan bagian dari adaptasi kaum migran, baik yang baru datang dari desa maupun yang telah dua-tiga generasi berpindah. Di Manila pertanian kota merupakan bagian dari inisiatif politik yang terkait dengan strategi untuk mengambil hati masyarakat miskin kota. Pemerintah pusat dan daerah mengajukan program pertanian sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan dan upaya meningkatkan gizi keluarga.

Tulisan kelima ditulis oleh Firdaus tentang kearifan lokal masyarakat Manggarai Barat dalam menjaga dan mempertahankan keberlanjutan lingkungan. Menurut Firdaus, masyarakat Manggarai Barat memiliki *Puar Cama* sebagai milik bersama dengan sistem *tuak*. *Puar Cama* dengan sistem *tuak* ini menurutnya merupakan kekuatan lokal dalam menjaga kalastarian lingkungan. Namun, di sisi lain masyarakat adat harus dihadapkan dengan hukum positif negara.

Tulisan keenam ditulis oleh Dian K. Anggreta tentang konflik lingkungan antar komunitas petani Kelurahan Kampung Jua Nan XX dengan PT. Semen Padang. Dalam tulisannya, Anggreta menguraikan pertentangan antara kedua kelompok dalam bentuk protes, negosiasi dan perundingan. Sumber konflik menurutnya berasal dari kerugian petani yang disebabkan oleh limbah PT. Semen Padang yang sudah dialami masyarakat sejak tahun 1985.

Akhirnya, kepada para penyumbang tulisan, redaksi mengucapkan terima kasih atas sumbangan tulisan, dan kepada pembaca kami ucapkan selamat membaca.

Salam
Redaksi

Daftar Isi

Pengantar Redaksi	iii
Daftar Isi	v
 Kontestasi Ruang: Tinjauan Sosiologis Terhadap Keadilan Ekologis Afrizal.....	 1
 Politik Ekologi: Ramah Lingkungan Sebagai Pembeneran Zainal Arifin	 11
 Islam Dan Lingkungan Abrar	 17
 Bertani di Dua Kota Asia; Menarik Pelajaran dari Jakarta dan Manila Semiarto A. Purwanto	 25
 <i>Puar Cama</i> Untuk Anak Cucu: Kearifan Lokal Untuk Sustainability Forest di Manggarai Barat Firdaus	 39
 Perjuangan Hak Ekologis Komunitas Petani Dian Kurnia Anggreta	 51
 Biografi Penulis	 61

PUAR CAMA UNTUK ANAK CUCU: Kearifan Lokal Untuk Sustainability Forest di Manggarai Barat¹

Firdaus

*(Dosen Program Studi Pendidikan Sosiologi,
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Sumatera Barat)*

Abstrak

Hutan menjadi penting bagi kehidupan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak. Dalam pemanfaatan hutan, masyarakat tidak jarang berperilaku eksploitatif. Di Manggarai Barat, Hutan Mbeliling memiliki fungsi penting sebagai penyangga daratan Manggarai dan pemasok air bersih warga kota. Selain itu, hutan Mbeliling juga memberikan ruang dan peluang yang besar bagi perekonomian warga. Untuk menjawab kebutuhan ekonomi, pemanfaatan hutan Mbeliling kadang-kadang keluar dari konsep sustainability. Tidak jarang hutan Mbeliling ditebang secara massal oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab. Hal tersebut berimplikasi terhadap ekosistem hutan dan berkurangnya flora dan fauna hutan. Di balik itu, jauh sebelum hutan dimanfaatkan secara eksploitatif, masyarakat adat Manggarai telah memiliki mekanisme adat dalam menjaga hutan. Tulisan yang bersumber dari hasil penelitian ini menguraikan mekanisme adat dan potensi kearifan masyarakat dalam mengelola hutan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Hutan, Puar Cama, Adat, Nempung Cama*

Pendahuluan

Manggarai Barat merupakan kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Manggarai² yang wilayahnya meliputi daratan Pulau Flores bagian Barat dan beberapa pulau kecil di

sekitarnya. Pulau-pulau tersebut antara lain Pulau Komodo, Pulau Rincah, Pulau Tetawa Besar, Pulau Tetawa Kecil, Pulau Bidadari dan Pulau Longgos. Manggarai Barat mempunyai alam yang sangat bervariasi, mulai dari daratan pantai yang datar, hingga tebing dan perbukitan yang curam. Perbedaan batuan, topografi dan curah hujan menghasilkan perbedaan vegetasi yang beragam. Perbedaan alam dan vegetasi itu didukung oleh perbedaan ketinggian daratan yang beragam, dimana 60% dari area daratan

¹ Tulisan ini bersumber dari hasil penelitian penulis pada tahun 2009 di Manggarai Barat. Penelitian ini didukung oleh Bird Life Denmark (DOF), The Royal Danish Ministry of Foreign Affairs (DANIDA) dan Burung Indonesia sebagai pelaksana dan mitra lokal.

² Kabupaten Manggarai Barat dimekarkan dari Kabupaten Manggarai berdasarkan UU No. 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Nusa Tenggara Timur.

berada pada ketinggian antara 0-499 mdl, 35% pada ketinggian 500-1.000 mdl dan sisanya 5% di atas 1.000 mdl.

Perbedaan ketinggian menyumbang terhadap perbedaan tipe hutan di dalamnya. Tipe hutan itu *pertama* hutan tropika semi awet hijau di atas batuan vulkanik yang terdapat pada ketinggian antara 400 – 1.100 mdl, dan *kedua* hutan tropika basah luruh daun di atas batuan vulkanik pada ketinggian di bawah 400 mdl. Hutan Mbeliling yang terkenal dengan berbagai jenis endemik dan spesies burung langka berada di kawasan hutan Manggarai Barat ini. Kawasan hutan Mbeliling menutupi areal seluas 30.412,360 Ha. Secara keseluruhan alokasi kategorikal kawasan hutan Mbeliling terdiri dari 7.624,083 Ha hutan konversi, 8.252,864 Ha hutan lindung, 13.079,183 Ha hutan produksi terbatas dan 1.456,230 Ha areal penggunaan lainnya. Secara administratif kawasan ini di kelilingi oleh 27 Desa yang tersebar di tiga kecamatan (Komodo, Sano Nggoang dan Lembor) (Burung Indonesia, 2009).

Keberadaan kawasan Hutan Mbeliling sangat penting sebagai penyangga daratan kabupaten Manggarai Barat yang memiliki tingkat kemiringan tinggi, rawan longsor. Kawasan hutan Mbeliling juga merupakan pemasok air bersih bagi masyarakat Manggarai Barat. Keberadaan penting hutan Mbeliling sangat dekat dengan kehidupan masyarakat di kawasan pedesaan yang banyak menggantungkan kehidupan mereka pada hutan. Mereka merambah hutan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Selain karena kehidupan kita yang didominasi oleh rejim utilitarian yang lebih suka mencapai hasil lewat jalan pintas (Peter Beilharz 1991:vii), status hutan dataran rendah Mbeliling yang 5,12% (120 km²) dari luas hutan yang ada ($\pm$ 23.420 ha) sebagai hutan produksi terbatas juga membuka ruang bagi masyarakat sekitar hutan untuk memanfaatkan hasil hutan sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi. Tulisan

ini akan mengulas pola pemanfaatan hutan Mbeliling oleh masyarakat dan kearifan lokal masyarakat Manggarai Barat dalam pengelolaan hutan secara adat.

Telaah Bacaan

Keterkaitan komunitas masyarakat pada sumber daya hutan sangat erat. Bahkan di banyak etnik di belahan dunia, kehidupan mereka sangat bergantung dari potensi yang ada di hutan. Keterkaitan dan ketergantungan masyarakat pada sumber daya hutan biasanya paling sedikit dapat dikelompokkan pada *pertama*, berkaitan dengan pemenuhan bahan pangan langsung dari dalam hutan seperti berburu hewan, bahan pangan, buah-buahan dan bahan konstruksi bangunan. *Kedua* berkaitan dengan kebudayaan dan religi. *Ketiga* berkaitan dengan kebutuhan lahan pertanian dan perkebunan untuk peningkatan dan pengembangan ekonomi keluarga. *Keempat* hutan sebagai sumber bahan obat-obatan (Awang, 2006:5-6). Dalam keterkaitan masyarakat dengan hutan sebagai sumber kehidupan dan penopang kebutuhan hidup warga, pemanfaatan hutan tidak jarang dilakukan secara eksploitatif dan bahkan merusak.

Studi yang dilakukan Awang (2006) menyebutkan kerusakan hutan di Lampung terjadi sebagai dampak migrasi penduduk ke Lampung melalui program transmigrasi dan secara spontan. Kerusakan hutan disebabkan karena pembukaan lahan yang dilakukan baik oleh pemerintah secara resmi sebagai lahan untuk transmigran maupun oleh pendatang spontan yang membuka lahan hutan secara tidak resmi. Pembukaan kawasan hutan oleh penduduk lampung sebenarnya sudah dimulai semenjak zaman kolonial Belanda tahun 1930-an dan dilanjutkan pada masa penjajahan jepang tahun 1942-1945. Pembukaan lahan hutan semakin meluas seiring dengan pertambahan penduduk.

Lebih lanjut, Awang menyebutkan interaksi penduduk dengan sumber daya hutan terjadi pada kawasan hutan negara dengan fungsi produksi dan konservasi seperti Taman Nasional Way Kambas dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TN-BSS). Di kawasan Taman Nasional Way Kambas, pemukiman berkembang meluas sejak tahun 1980-an yang dilakukan oleh penduduk pendatang dari Jawa dan daerah transmigrasi lainnya yang tidak mampu mengolah lahan usaha karena ketiadaan modal. Menebang kayu atau membalok merupakan alternatif untuk mencari uang secara instan. Di kawasan TN-BSS pembukaan lahan dilakukan oleh penduduk yang berasal dari etnik Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Semendo, Ogan, Sumatera Utara dan lainnya. Tujuan utama pembukaan kawasan hutan tersebut adalah untuk membangun kebun kopi dan sudah dimulai sejak 1960-an bersamaan dengan kedatangan transmigran spontan.

Studi lain ditulis oleh Hasan Simon (2004) tentang hubungan masyarakat dengan hutan berdasarkan studinya di Sambirito. Menurut Hasan, berdasarkan proses hubungan antara kehutanan dengan masyarakat di sekitarnya, pada tahun 1982 dapat dibedakan tiga macam daerah di hutan jati, yaitu daerah dengan hutan yang sudah rusak, daerah dengan hutan yang dalam perkembangan menuju rusak dan daerah dengan hutan yang masih baik. Dalam tulisannya, Simon menyebutkan bahwa kerusakan hutan jati dapat terjadi karena pencurian kayu perkakas, pencurian kayu bakar atau karena penggembalaan yang tidak terkendali. Penyebab utama aktifitas merusak hutan adalah karena kepadatan penduduk yang terus bertambah.

Kawasan Hutan Mbeliling dan Ekonomi Masyarakat

Belasan pulau berjejer di sepanjang bentangan Laut Flores dan Laut Sawu. Ia tersusun

apik dan rapi pada titik 080 14' dan 090 00' Lintang Selatan dan 1190 21' dan 2200 20' Bujur Timur. Beberapa pulau didominasi oleh warna kekuningan yang diantaranya merupakan pulau-pulau besar seperti Komodo dan Rincah. Semakin dekat ke darat, bentangan pulau semakin jelas hingga akhirnya kaki menapak di darat bersamaan dengan landingnya pesawat jenis Fokker 50 di Bandara Komodo sebagai sarana transportasi udara di Manggarai Barat. Aroma khas Manggarai Barat yang terkenal dengan spesies langka –konon merupakan keturunan kadal purba atau lebih dikenal dengan Komodo (*varanus komodoensis*)- semakin terasa dengan topografi alam berbatu dan tidak datar.

Manggarai Barat secara topografis didominasi oleh lereng curam dan tanah berwarna kuning dan pepohonan yang juga berwarna kekuningan dan mengesankan kegersangan bila musim kemarau pada pertengahan tahun³. Bila musim hujan datang di bulan-bulan hujan (antara November-April), semua tanaman dan tumbuhan kembali berwarna hijau dan rindang. Di musim-musim hujan ini, biasanya para petani turun ke sawah dan ladang untuk mengolah dan menanam lahan pertanian yang selama musim kemarau mereka tinggalkan dan hanya sesekali mereka datangi.

Kawasan Mbeliling membentang dengan ketinggian antara ± 1.230 mdpl di tengah-tengah daratan kabupaten Manggarai Barat. Secara administratif, kawasan Mbeliling mencakup tiga kecamatan Manggarai Barat, yaitu Kecamatan Komodo, Kecamatan Sano Nggoang dan Kecamatan Lembor. Total luas kawasan hutan Mbeliling 30.412,360 Ha dan terdiri dari dua RTK. RTK 109 dengan luas

³ Secara tradisi, masyarakat Manggarai di kawasan Mbeliling sangat faham bahwa sepanjang April-Oktober adalah musim kemarau. Di musim itu masyarakat lebih banyak menghabiskan hari membersihkan kebun atau kegiatan-kegiatan yang tidak membutuhkan kelembaban yang bersumber dari hujan.

26.309,071 dan RTK 02 dengan luas 4.103,289. RTK 109 meliputi kecamatan Komodo dan Sano Nggoang, sementara RTK 02 meliputi kecamatan Lembor. Secara keseluruhan kawasan Mbeliling dikelilingi oleh 27 desa di sekitarnya yang enam desa diantaranya berada di Kecamatan Komodo, 17 desa di kecamatan Sano Nggoang dan 4 desa di kecamatan Lembor.

Secara umum, kondisi geografis desa-desa di kawasan Mbeliling hampir sama, kecuali di kecamatan komodo di dataran rendah yang relatif datar. Konjungtur tanah yang tidak rata dan berbukit, dengan topografi berbatu dan jalan-jalan yang masih tanah menjadikan desa-desa sulit dijangkau dengan kendaraan, apalagi pada musim hujan. Untuk memasuki desa-desa di Manggarai Barat perjalanan tidaklah mudah, bahkan sangat sulit jika musim hujan sudah tiba. Kecuali itu, beberapa desa yang ada di sekitar Mbeliling yang dilewati jalan trans Flores seperti Liang Dara, Cunca Lolos dan lainnya sangat mudah diakses dengan berbagai jenis kendaraan. Namun untuk masuk ke anak-anak kampung, kondisinya relatif sama.

Di desa-desa sekitar kawasan Mbeliling, masyarakat bermatapencaharian sebagai petani. Mayoritas tanaman mereka adalah tanaman tua berupa kemiri, kopi, coklat dan cengkeh. Di dataran tinggi tanaman utama mereka adalah kemiri. Selain itu, pertanian sawah terutama mereka lakoni pada musin hujan tiba dengan sistem sawah tadah hujan dan irigasi. Untuk pertanian dengan sistem perladangan, tidak banyak dilakoni oleh masyarakat, kecuali hanya di sekitar pemukiman mereka di desa-desa.

Mata pencaharian yang bersumber dari perkebunan tanaman tua, menghendaki lahan yang luas. Kebutuhan akan lahan yang luas tersebut menjadikan masyarakat pada masa lampau merambah hutan sebagai lahan baru dengan sistem *lodok*. *Lodok* dibuka secara

bersama-sama dalam satu keluarga besar dan hasilnya dibagi sama luas dengan mengambil titik dari tengah, dan garis pembagian ditarik ke arah luar sehigga membentuk seperti jaring laba-laba. Dengan sistem ladang berpindah, *lodok* kemudian ditinggalkan dan kembali menjadi hutan yang dalam bahasa Manggarai disebut dengan *puar*.

Puar dalam perspektif masyarakat adat Manggarai berbeda dengan hutan dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Hutan dalam UU ini didefinisikan dengan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Konsep *puar* dalam masyarakat adat Manggarai di kawasan Mbeliling adalah kawasan yang tidak digunakan sebagai lahan untuk berladang dan atau kegiatan pertanian lainnya, dan penguasaan terhadapnya berada di tangan Tua Golo⁴. Dengan definisi ini lahan lepas yang sebelumnya adalah *lingko*⁵ dan tidak lagi dikelola sebagai ladang pertanian adalah *puar*, penguasaannya berada di tangan Tua Golo. Dengan demikian hutan dalam perspektif masyarakat bukanlah hamparan yang didominasi pepohonan, melainkan lahan kosong yang tidak dikelola untuk pertanian dan statusnya dikuasai Tua Golo.

Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat

Dalam mekanisme adat, mengambil isi *puar* untuk kepentingan apapun tidak dapat dilakukan secara bebas, akan tetapi harus seizin

⁴ *Tua Golo* adalah pemimpin adat tertinggi dalam kepemimpinan masyarakat Manggarai Barat untuk lingkup satu *golo* (gunung). *Golo* adalah sistem pemerintahan terendah di Manggarai Barat dalam sistem pemerintahan adat. Sekarang, *golo-golo* sudah berubah menjadi desa sejak pemerintahan Orde Baru yang mengatur pemerintahan desa.

⁵ *Lingko* adalah satuan lahan yang dibuka bersama dalam bentuk lingkaran dengan sistem pembagian berbentuk jaring laba-laba

Tua Golo dengan menggunakan mekanisme adat yang disebut *tuak*⁶. Untuk mengambil batu –yang biasa digunakan untuk memagar ladang- yang ada dalam puar sekalipun, masyarakat harus minta izin dengan Tua Golo. Hal ini berlaku dalam hukum adat masyarakat di kampung Mbuhung desa Tiwu Nampar dulunya. Namun sekarang, peraturan tersebut sudah tidak dilaksanakan lagi karena semakin kurnya fungsi adat dalam masyarakat yang semakin kompleks dan heterogen.

Di kampung Langgo dan anak kampung lainnya di desa Wae Lolos misalnya, isi puar hanya dimanfaatkan oleh *koe* (anak-anak) kampung Langgo, kampung Ndengo dan kampung Tembel untuk diambil kayunya guna membangun rumah, memperbaiki rumah dan kayu api. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat tidak menggantungkan hidup dengan *puar*, melainkan dari pertanian. Untuk mengambil kayu dari *puar* masyarakat di tiga kampung harus menjalani mekanisme adat yang disebut dengan *tuak*.

Mekanisme *tuak* adalah prosedur meminta isi hutan dengan membawa *tuak*. Isi *tuak* adalah rokok, uang sekemampuan dan *sopi*⁷ sebagai pembuka cerita dalam menyampaikan maksud kepada Tua Golo. Dalam membuat keputusan, Tua Golo memanggil Tua Batu yang ada di *golo* yang dipimpinnya untuk memusyawarahkan permintaan anggota keluarga yang berkeinginan untuk mengambil isi *puar*. *Tuak* yang dibawa oleh *koe* digunakan untuk konsumsi pertemuan. Dalam pertemuan, keputusan diambil, jika keputusan pertemuan memberi izin, maka *koe* tersebut dapat mengambil kayu *puar* sebatas kebutuhan, namun jika keputusan tidak memberi izin, maka yang bersangkutan tidak boleh mengambil kayu tanpa izin. Jika tetap mengambil dengan tanpa izin Tua Golo, maka Tua Golo berwenang

memberikan sanksi sebagai bentuk hukuman. Sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi adat maupun sanksi hukum negara dengan dakwaan tindak pidana pencurian.

Pertumbuhan penduduk dan pembagian tanah yang terus dilakukan kepada anak cucu mengakibatkan terjadinya penyempitan lahan, sehingga *puar* sedikit demi sedikit mulai habis karena tanah sudah habis dibagi untuk anggota keluarga dengan sistem warisan yang dibagi sama banyak kepada anak laki-laki dalam keluarga. Hal tersebut berimplikasi terhadap pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga masyarakat mulai masuk ke hutan untuk membuka lahan baru mendekati pembatas yang dipasang oleh Belanda pada tahun 1928.

Pasca penetapan hutan Mbeliling sebagai hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi tahun 1987, masyarakat juga masih memanfaatkan hutan. Pemanfaatan tersebut terutama di lahan yang dulunya adalah milik masyarakat dimasukkan dalam kawasan hutan negara. Hal tersebut karena proses pemasangan pilar pembatas hutan kawasan oleh pemerintah pada masa itu, menurut masyarakat tidak melalui mekanisme adat *nempung cama* (musyawarah) dimana semua warga terlibat. Pemerintah pada masa itu hanya melakukan pembicaraan dengan elit pemerintahan desa di kantor desa dan tidak memusyawarahkan batas-batas untuk memasang pilar dengan masyarakat akar rumput. Akibatnya, banyak lahan masyarakat masuk dalam kawasan. Di desa Tiwu Nampar setidaknya ada 5 *lingko* milik masyarakat masuk dalam kawasan. Kemudian di Macang Tanggar dua *puar cama* –Wewo Nara dan Nua Kaba- juga masuk dalam kawasan. Di desa Golo Manting perkampungan lama dan lahan perkebunan masyarakat yang masih produktif seperti tanaman kemiri, nangka, pinang dan lain sebagainya juga masuk dalam wilayah kawasan.

Pengambilan kayu oleh masyarakat tidak dalam skala besar untuk dijual, akan tetapi sekedar untuk kebutuhan membangun rumah

⁶ *Tuak* adalah mekanisme adat dimana keluarga yang ingin berurusan secara adat dengan orang lain dan terutama dengan Tua Golo membawa air *tuak* yang terbuat dari nira, rokok dan uang sebagai seserahan.

⁷ *Sopi* adalah minuman keras terbuat dari fermentasi air pohon aren.

atau kayu api. Untuk kebutuhan membangun rumah, minimal masyarakat membutuhkan kayu sebanyak 6 batang sebagai tiang utama. Selain itu, kebutuhan lainnya mereka ambil di kampung dari ladang pribadi atau dengan meminta pada keluarga dekat. Namun jika tidak memiliki kayu di kebun pribadi mereka tetap mengambil kayu di hutan tutupan. Kayu –terutama untuk tiang-tetap diambil di hutan karena kayu hutan secara kualitas lebih kuat dan tahan lama dibanding kayu yang ada di ladang di kampung mereka. Jenis kayu yang diambil oleh masyarakat dari hutan tutupan dan kegunaannya biasanya adalah :

Kodal	: Digunakan untuk balok
Muku Te'e	: Digunakan untuk tiang pahat
Tampa	: Digunakan untuk tiang tanam
Lawar	: Digunakan untuk plang tiang
Wajur	: Digunakan untuk plang tiang
Kopi Puar	: Digunakan untuk plang tiang

Di desa Golo Manting, selain tidak memiliki kayu di lahan sendiri, masyarakat juga tidak dapat membeli kayu karena di desa tidak ada sistem jual beli kayu. Yang ada dalam sistem adat masyarakat hanya pola kekeluargaan, yaitu mekanisme tuak untuk meminta kayu kepada kerabat-kerabat dekat –kerabat *ca ame (se-ame)* atau kerabat *ca batu (se-batu)*. Mekanisme tuak dilakukan dengan membawa tuak kepada kerabat dengan maksud meminta kayu yang dimilikinya. Kerabat tersebut akan mempertimbangkan dengan menghitung kayu yang mungkin bisa diberikan kepada kerabat yang membutuhkan. Jika kerabat yang memiliki kayu bersedia memberikan kayu satu atau dua batang, maka kayu boleh diambil dan diganti dengan uang sekemampuan. Uang pengganti tidak senilai dengan harga kayu yang diberikan jika dibandingkan dengan harga pasar. Namun jika tidak ada kayu yang mungkin bisa diberikan maka kayu tidak bisa didapatkan.

Di desa Macang Tanggar sebelum pemekaran kabupaten Manggarai Barat, dan kawasan Mbeliling masih dalam wilayah

administratif kabupaten Manggarai, pengawasan terhadap hutan tidak terlalu ketat. Dengan tidak ketatnya pengawasan terhadap hutan, hutan Mbeliling banyak dibabat oleh orang dari luar yang menebang pohon di hutan untuk kepentingan bisnis. Menurut Kepala Desa Macang Tanggar, dulu hampir tiap hari bunyi mesin *chian saw* terdengar membabat hutan dan mobil-mobil besar keluar masuk membawa kayu. Kepala desa sendiri tidak tahu kayu tersebut dibawa kemana. Namun dari isu yang ia dengar kayu tersebut di bawa ke pulau-pulau di sekitar flores dan bahkan juga dibawa keluar Manggarai. Selain pengusaha, masyarakat juga bebas masuk hutan mengambil kayu untuk membuat/memperbaiki rumah dan untuk kayu api karena pengawasan dari pemerintah waktu itu sangat longgar.

Berbeda dengan desa Tiwu Nampar, kayu hutan kawasan di Tiwu Nampar diambil oleh oknum dari desa tetangga. Kayu tersebut konon dibawa ke pulau Rinca dan Komodo untuk dijual. Beberapa tahun yang lalu, menurut informan kami, bahkan ada yang tertangkap tangan oleh petugas kehutanan karena dilaporkan oleh masyarakat, namun sampai sekarang kasusnya tidak kedengaran sudah sampai dimana. Masyarakat pun tidak tahu sejauh mana proses hukum oknum tersebut berjalan. Sementara masyarakat desa sendiri cukup patuh dengan larangan pemerintah untuk tidak mengambil kayu di hutan tutupan, dan bahkan mereka turut berpartisipasi menjaga hutan dengan melaporkan penebangan kayu kepada pihak yang berwajib.

Hutan Negara; Dilema Antara Hak dan Kewajiban

Seperti sudah disinggung di atas, pasca pemasangan pilar batas kawasan mbeliling 1987 oleh pemerintah, di Tiwu Nampar sedikitnya masyarakat kehilangan 5 lingklo. Isi lingklo tersebut dominan adalah hutan jati yang dulunya waktu pembukaan lingklo pada tahun 70-an hingga terakhir tahun 82 ditanam oleh

masyarakat dengan bibit yang diambil dari desa Mata Wae. Untuk mencapai desa Mata Wae, dulu mereka harus berjalan kaki hampir satu minggu pulang pergi. Sekarang hutan jati meraka sudah besar dan layak untuk dipanen. Namun hutan jati tersebut tidak dapat mereka panen dan nikmati hasilnya secara langsung karena sudah berstatus Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Di satu sisi masyarakat patuh dengan kebijakan dan hukum yang menetapkan sebagai dan bahkan seluruh lahan mereka sebagai hutan tutupan mengingat sanksi hukum yang mengancam. Di sisi lain masyarakat memiliki hak atas kepemilikan lahan perkebunan yang telah mereka usahakan semenjak lama sebelum penetapan hutan menjadi hutan tutupan. Mekanisme penetapan hutan yang secara sefihak pada waktu itu, membuat masyarakat kini hanya bisa gigit jari dengan keteledoran mereka. Konon katanya, petugas yang memasang pilar waktu itu mengatakan bahwa penetapan lingko mereka sebagai hutan tutupan tidak boleh diambil kayunya hanya bersifat sementara dan nanti mereka boleh mengambil isinya.

Apa yang dikatakan petugas pada saat pemasangan pilar di Tiwu Nampar memang benar adanya, karena status lingko mereka ditetapkan sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang boleh diproduksi melalui Hak Pengelolaan Hutan (HPH) oleh pihak swasta dan pemerintah yang diatur oleh Undang-undang berikut turunannya (PP, Kepmen dan SK Menhut). Untuk memanfaatkan secara langsung seperti memanfaatkan hasil lahan milik sendiri, tentu tidak dapat dilakukan mengingat status lahan mereka yang sudah berubah menjadi hutan negara. Masyarakat hanya dapat mengambil dan memanfaatkan hasil lahan mereka jika mengurus HPH dengan mendirikan koperasi dan bekerjasama dengan swasta untuk mengelola HPT tersebut. Namun itu merupakan jalan yang panjang. Dan pada intinya masyarakat tidak lagi memiliki lahan beserta isinya yang dulu adalah hak milik mereka.

Sekarang masyarakat dihadapkan dengan dilema antara mengambil kayu di hutan tutupan atau tidak memiliki rumah sama sekali. Selain itu, untuk membeli kayu mereka juga diberatkan dengan biaya *cruising* dan sumbangan pihak ketiga (SP3) yang diminta oleh petugas di lapangan yang semestinya tidak harus mereka bayar. Biaya SP3 yang diatur melalui Perda Kabupaten Manggarai No. 17 tahun 2005 tentang Sumbangan Pihak Ketiga atas Pengumpulan dan atau Pengeluaran Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan Perikanan, Hasil Laut, Kehutanan dan Hasil Perindustrian sebenarnya hanya berlaku untuk pengumpul sebagaimana diatur dalam pasal 5 Perda tersebut. Sementara untuk barang-barang sendiri yang tidak diperdagangkan dalam jumlah tertentu tidak dikenakan sumbangan sebagaimana diatur dalam pasal 6 poin c.

Dalam prakteknya di lapangan, masyarakat yang mengambil kayu di ladang sendiri dan untuk kepentingan sendiri tetap dikenakan biaya *cruising* dan biaya SP3 (surat pemberitahuan peneangan pohon) yang jumlahnya ratusan ribu. Kondisi ini memberatkan bagi masyarakat desa. Keluhan tersebut merata dirasakan oleh masyarakat di semua kawasan sebagaimana juga terungkap dalam musyawarah besar AMAL (Aliansi Masyarakat Adat Mbeliling) di Mbodong tanggal 11-13 Agustus 2009 di Mbodong, Desa Golo Mbu.

***Puar Cama*; Potensi Peletarian dan Pengelolaan Hutan Secara Adat**

Puar Langgo adalah hutan sepakat milik orang Langgo dengan luas hampir 100 Ha yang berada di sebelah utara Golo. Sampai sekarang *puar langgo* masih lestari dan pohon-pohon terlihat dari kampung berjejer sepanjang *puar* tersebut. Konon *puar* tersebut sudah berusia ratusan tahun dan turun temurun diwarisi oleh orang kampung Langgo semenjak nenek moyang mereka masuk di sana. Hutan tersebut tidak boleh ditebang oleh siapapun kecuali dengan seizin Tua

Golo dan hanya terbatas untuk anak cucu orang Langgo yang membutuhkan bahan kayu untuk membangun rumah. Kayu yang boleh diambil juga tidak sembarangan, akan tetapi diatur sedemikian rupa, sehingga kayu hanya boleh diambil sekedar kebutuhan dan tidak boleh melebihi kebutuhan.

Orang Kampung Rangat, Desa Wae Lolos juga memiliki *puar cama* yang mereka sebut dengan Puar Mbodong di sebelah utara kampung Rangat. Meski tidak seluas Puar Langgo, Puar Mbodong memiliki fungsi yang kurang lebih sama dengan Puar Langgo, yaitu untuk memenuhi kebutuhan anak cucu terhadap kayu dalam membangun rumah. Puar Mbodong menurut Tua Golo Rangat memiliki Luas ± 5 ha yang merupakan bekas lingko orang Rangat yang belum dibagi dan sekarang dikuasai oleh Tua Golo. Kayu di puar Mbodong belum terlalu besar karena puar Mbodong baru dijadikan sebagai hutan sepakat semenjak Tua Golo sekarang menjabat sebagai Tua Golo di kampung Rangat, sekitar 10 tahun yang lalu. Namun demikian, untuk kepentingan jangka panjang puar Mbodong diharapkan mampu menjawab kebutuhan anak cucu orang Rangat terhadap kayu. Namun jika kemudian kondisi mengharuskan –menurut Tua Golo- maka mau tidak mau tanah puar tersebut suatu saat akan dibagi kepada anak cucu yang membutuhkan.

Mekanisme pengelolaan isi puar Mbodong juga hampir sama dengan mekanisme pengelolaan puar Langgo. Untuk mengambil isi puar Mbodong guna kepentingan membangun rumah juga harus dengan seizin Tua Golo. Jika kayu diambil dengan tanpa izin Tua Golo, maka hukumannya adalah denda dengan tuak hingga 100 botol. Dan hukuman lainnya dapat berupa dipukul oleh masyarakat dan yang bersangkutan harus mengakui telah melakukan kesalahan mengambil hasil puar Mbodong dengan tanpa izin Tua Golo.

Orang Rambang di desa Golo Kempo juga memiliki puar cama seluas 10 ha (satu Lingko) yang mereka sebut dengan golo Robo Cie di ujung kampung yang merupakan perbatasan antara

kampung Rahak dengan kampung Rambang. Golo Robo Cie juga memiliki fungsi yang sama dengan puar cama lainnya yang ada di kampung-kampung lain. Dulunya pengaturan Golo Robo Cie tidak setegas yang berlaku di Puar Langgo. Semua anak cucu kampung Rambang bebas mengambil kayu yang ada di dalam puar dan tidak harus minta izin kepada Tua Golo mengambil isi hutan. Namun seiring dengan semakin meningkatnya intensitas pengambilan kayu dan semakin pentingnya arti hutan bagi masyarakat, pemerintah desa Golo Kempo pada tahun 2009 mengeluarkan Peraturan Desa guna mengatur mekanisme pengambilan kayu di Golo Robo Cie melalui Perdes No. 01/IV/2009 tentang hutan ulayat. Perdes tersebut mengatur bahwa untuk mengambil kayu di Golo Robo Cie harus dengan seizin Tua Golo dan diketahui oleh kepala Dusun serta disetujui oleh Kepala Desa. Selain Golo Robo Cie, di desa Golo Kempo juga terdapat puar cama milik masyarakat kampung Lara, yaitu Mbahong dan puar cama masyarakat Rahak, yaitu Golo Kempo.

Puar cama tidak hanya dimiliki oleh masyarakat di Kempo, tetapi juga masyarakat di Mburak. Masyarakat desa Macang Tanggar juga memiliki puar sebagaimana yang dimiliki masyarakat Langgo dan lainnya di kawasan Kempo. Hanya saja dua diantara puar cama yang dimiliki masyarakat sekarang masuk dalam kawasan hutan negara. Puar yang dimiliki oleh masyarakat Macang Tanggar dan sekarang masuk dalam kawasan hutan adalah Wewo Nara di kampung Kenari dan Nua Kaba di kampung Mburak. Selain dua puar tersebut juga ada Buleng di kampung Lemes seluas 100 Ha dan Gunung Gorontalo di kampung Mburak seluas 60 Ha. Namun sayangnya puar masyarakat Macang Tanggar tersebut tidak terkelola dengan baik sebagaimana puar Langgo, sehingga fungsinya tidak optimal untuk memenuhi kebutuhan anak cucu terhadap kayu untuk membangun rumah.

Menurut Muhammad Tayyib (92 tahun), Tua Golo Macang Tanggar yang juga mantan wakil gamante pada tahun 1968-1978, dulunya puar

tersebut masing-masing punya fungsi. Wewo Nara dan Nua Kaba isinya seperti rusa, kijang, kerbau liar dan lain sebagainya merupakan hak dalu yang memerintah. Sementara Buleng dan Gunung Gorontalo digunakan sebagai tempat memelihara lebah hutan yang diambil lilinnya untuk membayar marak taki (pajak) kepada raja Bima. Meskipun demikian kayu-kayu dan tumbuhan lain yang ada di dalamnya boleh diambil oleh masyarakat untuk kebutuhan membangun rumah dan atau memperbaiki rumah atau kebutuhan lainnya. Namun mekanisme mengambil kayu di puar tersebut tidak diatur, akan tetapi bebas bagi siapa saja yang mau mengambil karena status puar adalah milik bersama. Meskipun demikian, pengambilan isi hutan tidak secara eksploitatif untuk dijual, tetapi hanya sebatas kebutuhan kayu api dan kayu untuk membangun rumah.

Di desan Tiwu Nampar dan desa Golo Manting, puar sebagaimana dimiliki oleh masyarakat golo di desa lainnya tidak dimiliki. Hal ini karena di desa Golo Manting, menurut Yakobus Rabu (62 tahun) –Tua Beo kampung Lando- tanah sudah habis dibagi untuk anak cucu, sehingga tidak ada lagi tanah milik bersama. Kemudian di desa Tiwu Nampar, puar juga tidak dimiliki, hanyasaja menurut M. Sutar (45 tahun) –Tua Golo kampung Mbuhung- kampung Mbuhung masih memiliki lahan yang belum dibagi kepada masyarakat dan lahan tersebut secara tidak langsung merupakan puar masyarakat kampung Mbuhung. Dengan status sebagai puar isi lahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Mbuhung.

Tahun 1969 Wae⁸ Racang dan Wae Bensung meluap, mengakibatkan banjir yang menghantam kampung Ndengo dan beberapa kampung lainnya yang dialiri oleh dua sungai tersebut. Ladang-ladang dan sawah-sawah masyarakat di Ndengo berantakan dan bahkan banjir juga menelan

korban jiwa. Meluapnya dua sungai tersebut mengejutkan masyarakat Ndengo yang tidak mengira akan terjadi bencana banjir tanpa sempat menyelamatkan harta benda mereka.

Pasca bencana, masyarakat desa Wae Lolos secara umum dan kampung Ndengo khususnya kemudian memahami arti penting memelihara hutan untuk kelangsungan hidup dan lingkungan mereka. Masyarakat mulai mengerti dan memahami anjuran nenek moyang untuk tidak membuka lahan dengan tingkat kemiringan tinggi menjadi lingko. Masyarakat Macang Tanggar sekarang juga merasa sangat rugi dengan gundulnya hutan mereka yang disebabkan oleh penjarahan yang dilakukan oleh orang luar pada masa-masa sebelum pemekaran kabupaten Manggarai Barat. Di musim kemarau datang mereka kesulitan air untuk mengairi sawah dan bahkan beberapa sawah menjadi “lahan tidur” kalau musim kemarau datang. Sawah-sawah hanya bisa ditanami padi di musim hujan saja. Kalau musim kemarau sudah datang, sarana irigasi tidak lagi dilalui air seperti sediakala. Mereka faham bahwa air yang ada di hulu tidak mampu bertahan lama jika hutan dalam keadaan gundul tanpa pohon penyangga air. Masyarakat Tiwu Nampar yang sebagian air mereka dibawa ke Labuan Bajo sebagai pemasok kebutuhan air masyarakat kota sangat penyusutan air setelah air mereka dibawa ke kota Labuan. Air untuk mengolah sawah sudah sulit karena pengurangan tersebut. Kesadaran akan arti penting air dan fungsi hutan sebagai penjaga kualitas dan kuantitas air menjadikan masyarakat perlahan-lahan mulai menyadari akan arti penting hutan bagi kehidupan mereka. Sehingga setiap kali ada pencurian di hutan mereka, secara partisipatif masyarakat akan melaporkan peristiwa pencurian kepada pihak yang berwajib atau pemerintah desa.

Secara alamiah, dari fenomena alam dan peristiwa-peristiwa di lingkungan, masyarakat memahami akan pentingnya hutan dalam menopang kehidupan. Lawang (1999) menulis

⁸ Wae dalam bahasa Manggarai yang berarti sungai. Wae Racang berarti Sungai Racang.

bahwa tidak terdapat kesan orang Manggarai melindungi hutan-hutannya, sebaliknya konsep mereka tentang keselamatan dalam sistem kepercayaannya, justru mendorong mereka untuk membabat hutan-hutan, antara lain karena di dalam hutan-hutan itulah setan-setan bermukim. Sistem perladangan berpindah (*shifthing cultivaton*) ikut mempercepat musnahnya hutan-hutan di Manggarai itu (Lawang, 1999:86-87).

Dalam praktek perladangan dengan sistem berpindah (*shifthing cultivaton*) yang dilakukan oleh masyarakat Manggarai, apa yang dikatakan oleh Lawang benar. Bekas-bekas lingklo di puncak-puncak bukit masih terlihat jika kita melakukan perjalanan dari Labuan Bajo menuju Ruteng. Pemandangan tersebut banyak terlihat di puncak-puncak bukit selepas Bambor menuju Ruteng. Garis-garis pembagian lahan lingklo dengan sistem lodok masih terlihat meskipun diantaranya sudah mulai kabur karena *kope-kope* kelihatan juga sudah dibagi dengan *system lapat*. Namun dalam konteks masyarakat di kawasan Mbeliling, nenek moyang orang kampung Lando telah mengajarkan kepada anak cucu mereka untuk memelihara hutan dengan mekanisme adat, dimana isi hutan boleh diambil hanya dengan seizin Tua Golo sebagai pemimpin adat.

Puar-puar cama tersebut merupakan kearifan masyarakat secara langsung dalam memelihara hutan secara adat. Mekanisme perizinan dalam mengambil isi puar yang harus melalui Tua Golo adalah sebuah mekanisme adat dalam menjaga dan melastarkan hutan. Struktur adat dimana Tua Golo adalah pemegang peran sentral dalam penguasaan terhadap tanah dapat diperluas dengan menjadikannya pemegang peran dalam memelihara dan melestarikan hutan. Perluasan dapat dilakukan dengan melibatkan strukturnya hingga ke tua ame untuk bertanggung jawab terhadap koe (warga)-nya masing-masing.

Selain itu, dengan sistem ekonomi masyarakat di kawasan Mbeliling semenjak tahun 1970-an adalah pertanian dengan komoditi

tanaman tua secara tidak langsung, pertanian tanaman tua dapat menciptakan kebun kayu di ladang masyarakat meskipun kebun tidak masuk dalam kategori hutan primer sebagaimana dikatakan oleh Sagala (2002;131) bahwa hutan primer adalah tempat tinggal organisme dalam keadaan seimbang. Kebun kayu (*timber plantation, forestry plantation*) adalah tanaman buatan, karena itu kebun kayu tidak disebut hutan. Namun demikian sistem pertanian yang dilakoni oleh masyarakat mampu menambah jumlah tegakan pohon yang turut menyangga stabilitas lahan dan air.

Pola berladang masyarakat yang sudah terbiasa dengan tanaman tua dan kondisi lahan yang tidak memungkinkan untuk tanaman muda dengan masa musim kemarau yang panjang juga menjadi faktor pendukung dalam pengembangan perkebunan rakyat. Dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat di sektor perkebunan tersebut perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola perkebunan jenis tanaman tua.

Meningkatkan kuantitas tegakan dengan memperkuat pertanian masyarakat dengan komoditi tanaman tua sangat potensial dikembangkan mengingat kebiasaan bertani masyarakat yang mengikuti siklus cuaca. Laporan ekonomi produktif masyarakat Manggarai Barat tahun 2009 yang dilakukan oleh Burung Indonesia menyatakan bahwa kopi, Jambu mete, kemiri, kakao, dan pembuatan gula aren merupakan pertanian dengan ekonomi yang layak dan prospektif untuk dikembangkan ke depan dalam mendukung perekonomian masyarakat.

Nempung Cama Untuk Membangun Puar Cuma : Sebuah Kesimpulan

Masyarakat pedesaan di kawasan Mbeliling bukanlah masyarakat konsumtif dengan pola hidup yang super wah dan dipenuhi dengan fasilitas serba lux. Masyarakat pedesaan

di kawasan Mbeliling adalah masyarakat sederhana yang terbiasa hidup dalam suasana kesederhanaan. Hal itu terlihat dari pola hidup mereka dalam konsumsi makanan. Bayangkan, di rumah seorang kepala desa atau bahkan di rumah keluarga seorang wakil Bupati dan Ketua legislatif daerah tingkat II, ditemukan makanan yang sama seperti ditemukan di rumah seorang yang papa. Segelas kopi tetap menjadi hidangan dimanapun kita bertamu ke rumah penduduk –baik orang kaya maupun orang papa. Begitu juga dalam hal makanan pokok, masyarakat desa di kawasan Mbeliling tidak mengutamakan lauk pauk, akan tetapi lebih mengutamakan nasi sebagai makanan pokok.

Persoalan yang belakangan muncul adalah kesulitan dalam mengambil kayu untuk membangun rumah. Hal ini disebabkan karena beberapa ladang dan lahan pertanian masyarakat sekarang berubah fungsi menjadi hutan negara. Secara adat, orang tua di Manggarai berkewajiban membuatkan sebuah rumah sebagai tempat berteduh bagi anak cucu kelak kalau mereka sudah berkeluarga. Persoalan kayu yang sulit dan penyempitan lahan memaksa masyarakat untuk mengambil kayu dengan cara mencuri di hutan tutupan untuk membangun dan mendirikan rumah mereka.

Gejala yang terjadi di desa Golo Manting, Golo Kempo dan desa-desa lainnya sudah selayaknya disikapi sejak dini dengan menyusun strategi berbasis masyarakat dengan “*menempung-camakan*” masyarakat di desa dan melibatkan semua fihak. Bagaimana ke depan semua kampung memiliki *puar cama* yang dikelola dengan baik seperti *puar langgo* yang sudah diwarisi dari nenek moyang mereka. Kampung Rambang misalnya, sudah memulai dengan menetapkan Golo Robo Cie yang dulu merupakan miliki golo dan tidak dikelola dengan baik sudah mulai ditata dan bahkan melibatkan pemerintahan desa dengan menerbitkan suatu Peraturan Desa untuk mengaturnya. Isi *puar* juga sudah mulai diisi dengan tanaman kayu yang

suatu saat dapat dimanfaatkan oleh anak cucu dengan izin tua golo dan diketahui pemerintah desa sebagaimana diatur dalam Perdes.

Gagasan membangun *puar cama* untuk masa depan masyarakat dalam menjawab kebutuhan terhadap kayu sekaligus untuk memperkuat eksistensi dan fungsi Tua Golo dalam struktur kepemimpinan secara adat. Pemerintahan desa hanya meletakkan fungsi mereka dalam urusan administrasi kependudukan dalam lingkup pemerintahan RI sebagai perpanjangan tangan pemerintah di kabupaten. Kemudian LSM, Swasta, Pemerintah Daerah dapat menempatkan diri mereka sebagai fasilitator dalam mengembangkan *puar cama* tersebut, dan jikapun akan berpartisipasi dengan memberikan bantuan, bantuan dapat diberikan dengan mensupport bibit pohon untuk *puar cama* dan tanaman pertanian jangka panjang lainnya yang dapat dikembangkan dalam sistem pertanian masyarakat. Fihak-fihak di atas juga dapat berperan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola hutan dan lahan pertanian dengan menggunakan teknologi pertanian.

Kerinduan terhadap adanya *puar cama* yang dikelola secara bersama untuk kepentingan masyarakat dalam menjawab kebutuhan akan kayu, sudah muncul dalam diri masyarakat. Namu persoalan yang muncul kemudian adalah persoalan lahan yang tidak ada. Untuk menjawab persoalan tersebut perlu dikembalikan kepada pemerintah yang memiliki otoritas mengembalikan sedikit status hutan lindung untuk dikelola sebagai *puar cama*. Dengan pola seperti ini, dalam jangka waktu paling lama 20 tahun ke depan atau satu periode keturunan kebutuhan akan kayu untuk membangun rumah akan dapat terjawab. Kemudian hutan tutupan sesuai dengan fungsinya juga akan mampu lestari. Burung-burung pun berkicau dengan riang menjelang pagi, petang dan bahkan sepanjang hari.

Kepustakaan

- Awang, San Afri, 2006. *Sosiologi Pengetahuan Deforestasi; Konstruksi Sosial dan Perlawanan*. Jogjakarta, Debut Press.
- Beilharz, Peter, 2003. *Teori-teori Sosial, Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dagur, Anthony Bagul, 2004. *Prospek dan Strategi Pembangunan Manggarai Dalam Perspektif Masa Depan*. Indomedia, Jakarta
- Lawang, Robert M. Z, 1999. *Konflik Tanah di Manggarai, Flores Barat : Pendekatan Sosiologik*. UI Press, Jakarta.
- Sagala, Parkas, 2002. *Mengelola Lahan Hutan Yang Benar*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Simon, Hasan, 2004. *Membangun Desa Hutan, Kasus Dusun Sambirito*. Gadjah Mada University Press, Jogjakarta
- Ekologi dan Budaya Flores Barat*. Sisipan National Geographic Indonesia. Edisi Desember 2008
- http://www.burung.org/detail_txt.php?op=article&id=45